



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LAILA CHAIRANI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK : 112413

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/101 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.555.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/123 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI , Rp. 2.575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV PRESTISE 1,5 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 284.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 990.564.900

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 437.133.281

F. HARTA LAINNYA Rp. 100.000.000

Sub Total Rp. 5.957.698.181

III. HUTANG Rp. 42.402.456

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.915.295.725

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DANY KURYANTO**
2. Jabatan : **PELELANG AHLI MADYA KPKNL JAKARTA I**
3. NHK : **111861**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
2. Tanah Seluas 134 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
3. Tanah Seluas 2.335 m2 di KAB / KOTA PATI, Rp. 335.000.000
4. Tanah Seluas 470 m2 di KAB / KOTA PATI, Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.100.000

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.650.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 250.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 60.855.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.734.605.000

III. HUTANG Rp. 75.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.659.105.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.